

Analisis Laporan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas

Suharman¹, Eko Febri Lusiono², U. Ari Alrizwan³, Yuliansyah⁴, Munandar⁵

¹Politeknik Negeri Sambas, e-mail: dzakwanherman@ymail.com

²Politeknik Negeri Sambas, e-mail: ekodelisa2004@gmail.com

³Politeknik Negeri Sambas, e-mail: uraiarialrizwan@gmail.com

⁴Politeknik Negeri Sambas, e-mail: yoelashshidiqie@yahoo.co.id

⁵Politeknik Negeri Sambas, e-mail: misturmunandar@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
30-11-2023

Direvisi:
26-02-2024

Diterima:
17-04-2024

ABSTRACT

This research aims to analyze the financial performance of the Sambas Regency Regional Government for 5 years from 2017 to 2021 and test whether there are differences in the performance of the degree of decentralization, performance of regional financial independence, performance of operating expenditures, and performance of capital expenditures. The analytical tools used are financial ratios, namely liquidity ratios, leverage ratios, debt ratios, productivity ratios and operating ratios. The research uses quantitative descriptive data analysis methods. The research results show that the liquidity ratio which consists of the average current ratio is 0.82, meaning that every Rp. 1,- of current debt is guaranteed by Rp. 0.82,- of current assets; The average cash ratio is 0.35, meaning that for every Rp. 1,- of current assets, Rp. 0.35 is cash and cash equivalents; the average cash to current liabilities is 0.29, meaning the regional government's ability to immediately pay every Rp. 1,- of current debt using cash and cash equivalents is Rp. 0.29,-; The average Quick Ratio is 0.60, meaning that the local government's ability to fulfill its short-term obligations for every Rp. 1,- using cash, cash equivalents and receivables is Rp. 0.60,-; The average cash flow ratio is 2.31, meaning the ability of a Regional Government's operating cash flow to pay for every Rp. 1,- of current debt owned using operating cash of Rp. 2.31,-. The leverage ratio measured is the Short Term Debt to Long Term Debt Ratio of 1.00. The debt ratio measured is the Total Liabilities to Current Assets Ratio. The average is 1.24 and the average Current Liabilities to Total Asset Ratio is 0.05, meaning that for every R.1,- debt is guaranteed by total assets of Rp.0.05,- The productivity ratio measured is Current Assets to Total Assets Ratio . The average is 0.04, meaning that for every Rp. 1,- current assets used for operational activities is Rp. 0.04,- Quick Asset to Inventory Ratio, the average is 2.67. The operating ratios measured include the average Earning Power of Total Investment of 0.10. The average financial independence ratio is 0.11 or 11%. From the aspect of relationship patterns and level of capability, the region is in the very low category with an instructive relationship pattern. The Public Participation Level Ratio is 0.07. This ratio shows the level of public participation in paying taxes, in this case all regional tax revenues, tax revenue sharing, both central and provincial. The higher the ratio value of the level of public participation of a Regional Government, the better it will be. From the calculation results it can be seen that for every Rp. 1,- Revenue, which comes from taxes is Rp. 0.07,- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) for the Regional Government of Sambas Regency, the average for 2017-2021 is 2.79 or still above the minimum requirement of 2.5 as regulated in PP No. 107 of 2000 concerning Regional Loans article 6 letter b. However, in 2020 the DSCR was 2.35 and in 2021 it was 1.79, which is below the minimum requirements as regulated in PP 107/2000. This condition is caused by the relatively increasing number of regional loans from year to year. So the regional government for the coming year must ensure that the DSCR is still at the minimum limit outlined by the central government because if loans continue to increase there will be concerns that the Sambas Regency Regional Government will not be able to meet mandatory spending as regulated by PP 30/2011 concerning regional loans explanation of article 15 paragraph (1) letter b.

Keywords : Analysis; Financial Reports; Financial Performance; Sambas Regency Government

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas selama 5 tahun sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 serta menguji apakah terdapat perbedaan kinerja derajat desentralisasi, kinerja kemandirian keuangan daerah, kinerja belanja operasi, dan kinerja belanja modal. Alat analisis yang digunakan adalah rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio *leverage*, rasio hutang, rasio produktivitas dan rasio operasi. Penelitian menggunakan metode analisis data deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio likuiditas yang terdiri dari *current ratio* rata-rata sebesar 0,82 artinya setiap Rp.1,- Hutang lancar dijamin oleh Rp.0,82,- aktiva lancar; *Cash ratio* rata-rata sebesar 0,35 artinya setiap Rp.1,- aktiva lancar, sebesar Rp.0,35 merupakan kas dan setara kas; *cash to current liabilities* rata-rata sebesar 0,29 artinya kemampuan pemerintah daerah untuk membayar segera setiap Rp.1,- hutang lancar menggunakan kas dan setara kas sebesar Rp.0,29,-; *Quick Ratio* rata-rata sebesar 0,60 artinya bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya untuk setiap Rp.1,- menggunakan kas, setara kas dan piutang sebesar Rp.0,60,-; *cash flow ratio* rata-rata sebesar 2,31 artinya kemampuan aliran kas operasi suatu Pemerintah Daerah untuk membayar setiap Rp.1,- hutang lancar yang dimiliki menggunakan kas operasi sebesar Rp 2,31,-. Rasio *Leverage* yang diukur adalah *Short Term Debt to Long Term Debt Ratio* sebesar 1,00. Rasio hutang yang diukur adalah *Total Liabilities to Current Asset Ratio* rata-rata adalah sebesar 1,24 dan *Current Liabilities to Total Asset Ratio* rata-rata adalah sebesar 0,05 artinya untuk setiap Rp.1,- hutang dijamin oleh total *asset* sebesar Rp.0,05,- Rasio Produktivitas yang diukur adalah *Current Asset to Total Asset Ratio* rata-rata adalah sebesar 0,04 artinya untuk setiap Rp.1,- aktiva lancar yang digunakan untuk kegiatan operasional adalah sebesar Rp.0,04,- *Quick Asset to Inventory Ratio*, rata-rata sebesar 2,67. Rasio Operasi yang diukur diantaranya adalah *Earning Power of Total Investment* rata-rata sebesar 0,10. Rasio Kemandirian keuangan rata-rata sebesar 0,11 atau sebesar 11%. Dari aspek pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah masuk pada kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Rasio Tingkat Partisipasi Publik sebesar 0,07. Rasio ini menunjukkan tingkat partisipasi publik dalam pembayaran pajak dalam hal ini adalah semua pendapatan pajak daerah, bagi hasil pajak baik pusat maupun propinsi. Semakin tinggi nilai rasio tingkat partisipasi publik suatu Pemerintah Daerah maka akan semakin baik. Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa untuk setiap Rp.1,- Pendapatan, yang berasal dari pajak adalah sebesar Rp.0,07,- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas rata-rata tahun 2017-2021 sebesar 2,79 atau masih berada diatas ketentuan minimal sebesar 2,5 sebagaimana diatur dalam PP 107/2000 tentang Pinjaman Daerah pasal 6 huruf b. Akan tetapi untuk tahun 2020 DSCR sebesar 2,35 dan tahun 2021 sebesar 1,79 berada di bawah ketentuan minimal sebagaimana di atur pada PP 107/2000. Kondisi ini disebabkan karena jumlah pinjaman daerah dari tahun ke tahun relatif meningkat. Jadi pemerintah daerah untuk tahun mendatang harus menjaga agar DSCR masih berada pada batas minimum yang telah digariskan oleh pemerintah pusat karena apabila pinjaman terus meningkat akan dikhawatirkan pemerintah Daerah Kabupaten Sambas tidak mampu untuk memenuhi belanja wajib sebagaimana di atur PP 30/2011 tentang pinjaman daerah penjelasan pasal 15 ayat (1) huruf b.

Kata Kunci : Analisis; Laporan Keuangan; Kinerja Keuangan; Pemerintah Kabupaten Sambas

Corresponding Author : U Ari Alrizwan, Politeknik Negeri Sambas, e-mail: dzakwanherman@ymail.com

PENDAHULUAN

Pembentukan Daerah Otonom sebagaimana diatur dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengubah pola pemerintahan yang semula Sentralistik menjadi Desentralistik. Sejak tahun 2000 pelaksanaan otonomi daerah mulai terealisasi secara bertahap. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, selama kurun waktu 26 tahun ini, terdapat beberapa daerah yang memiliki PAD di bawah 20 persen dan menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) (Kabid Lattas, 2022).

Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas merupakan salah satu Daerah yang memiliki PAD di bawah 20%. Berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, komposisi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah pada tahun 2019 sebesar 8,11% , tahun 2020 sebesar 7,77% dan tahun 2021 sebesar 8, 01%. Kondisi tersebut menunjukkan tahun 2020 dan 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebagai tahun dasar bahwa komposisi PAD terhadap Pendapatan mengalami penurunan. Porsi PAD terhadap total pendapatan daerah meningkat dari 13,86% di tahun 2001 menjadi 24,50% di tahun 2019 (Badan Kebijakan Fiskal, 2022). Apabila di Bandingkan dengan rata-rata Nasional, maka kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah Kabupaten Sambas masih sangat jauh dari rata-rata Nasional. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terjadinya pandemi covid-19 sehingga banyak sektor usaha yang mengalami kelesuan dan bahkan banyak usaha yang bangkrut sehingga melemahnya aktivitas ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap sumber-sumber PAD.

Tabel 1. Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Sambas Tahun 2017-2022

NO.	KETERANGAN	2017	2018	2019
A	Pendapatan	1.634.003.339.883,87	1.699.544.377.805,21	1.834.749.639.329,51
1	Pendapatan Asli Daerah	200.322.596.712,12	127.663.390.963,28	148.846.279.607,03
2	Pendapatan Transfer	1.432.363.793.309,00	1.493.970.701.385,00	1.582.193.180.001,00
3	Lain-lain Pendapatan yg Sah	1.316.949.862,75	77.910.285.456,93	103.710.179.721,48
B	Belanja	1.638.897.259.025,08	1.701.221.066.216,95	1.835.021.132.481,87
1	Belanja Operasi	1.072.650.389.102,62	1.147.790.347.628,49	1.192.771.286.328,78
2	Belanja Modal	319.523.642.409,54	286.654.817.075,64	339.865.824.788,00
3	Belanja Tak Terduga	27.026.973,00	801.474.379,00	289.442.857,00
4	Belanja Transfer	246.696.200.539,92	265.974.427.133,82	302.094.578.508,09
	Surplus (Defisit)	-4.893.919.141,21	-1.676.688.411,74	-271.493.152,36
C	Pembiayaan	33.251.187.362,15	45.897.268.208,34	33.024.710.916,96
1	Penerimaan Daerah	87.490.177.362,21	123.357.268.208,34	128.941.585.916,86
2	Pengeluaran Daerah	54.238.990.000,06	77.460.000.000,00	95.916.874.999,90
	Pembiayaan Netto	33.251.187.362,15	45.897.268.208,34	33.024.710.916,96
D	SILPA	28.357.268.220,94	44.220.579.796,60	32.753.217.764,60
NO.	KETERANGAN	2020	2021	2022
A	Pendapatan	1.669.647.856.825,95	1.850.514.381.733,21	1.701.640.624.410,00
1	Pendapatan Asli Daerah	129.676.504.956,48	148.139.103.732,57	167.637.283.800,00
2	Pendapatan Transfer	1.445.026.636.211,00	1.575.722.281.915,86	1.502.866.936.860,00
3	Lain-lain Pendapatan yg Sah	94.944.715.658,47	126.652.996.084,78	31.136.403.750,00
B	Belanja	1.692.191.085.750,19	1.854.895.554.871,16	1.816.576.722.060,00
1	Belanja Operasi	1.157.969.692.671,66	1.280.237.716.697,67	1.323.541.264.080,00
2	Belanja Modal	237.715.454.547,89	285.088.808.225,49	224.722.634.370,00
3	Belanja Tak Terduga	3.735.431.544,00	140.518.302,00	672.956.550,00
4	Belanja Transfer	292.770.506.986,64	289.428.511.646,00	267.639.867.060,00
	Surplus (Defisit)	-22.543.228.924,24	-4.381.173.137,95	-114.936.097.650,00
C	Pembiayaan	42.003.217.764,60	75.959.988.840,36	198.297.569.090,00
1	Penerimaan Daerah	127.753.217.764,60	172.459.988.840,36	351.297.403.240,00
2	Pengeluaran Daerah	85.750.000.000,00	96.500.000.000,00	152.999.834.150,00
	Pembiayaan Netto	42.003.217.764,60	75.959.988.840,36	198.297.569.090,00
D	SILPA	19.459.988.840,36	71.578.815.702,41	83.361.471.440,00

Tabel 2. Proporsi Sumber Pendapatan terhadap total pendapatan APBD Kabupaten Sambas Tahun 2017-2022

NO.	SUMBER PENDAPATAN	2017	2018	2019
1	Pendapatan Asli Daerah	12,26%	7,51%	8,11%
2	Pendapatan Transfer	87,66%	87,90%	86,23%
3	Lain-lain Pendapatan yg Sah	0,08%	4,58%	5,65%
NO.	KETERANGAN	2020	2021	2022
1	Pendapatan Asli Daerah	7,77%	8,01%	9,85%
2	Pendapatan Transfer	86,55%	85,15%	88,32%
3	Lain-lain Pendapatan yg Sah	5,69%	6,84%	1,83%

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa proporsi setiap sumber pendapatan terhadap total pendapatan untuk tahun 2017-2022 menunjukkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah hanya rata-rata sebesar 8,92% jauh lebih rendah dari rata-rata nasional pada tahun 2019 sebesar 24,50%. Artinya Desentralisasi Fiskal di Daerah masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sedangkan proporsi sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan transfer diantaranya Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan diantaranya Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi khusus (Fisik) ,Dana Alokasi Khusus (Non Fisik), transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian dan Transfer dari pemerintah daerah lainnya (Provinsi) berupa Bagi Hasil pajak dan Bantuan Keuangan masih sangat mendominasi sumber pendapatan yang selama tahun 2012-2021 rata-rata sebesar 86,97%. Selanjutnya proporsi Lain-lain pendapatan yang sah yang berasal dari Hibah, Dana Darurat dan Pendapatan lainnya untuk tahun 2017-2022 rata-rata sebesar 4,11%.

Belanja Daerah yang merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan selama periode tertentu menjadi bagian penting untuk di analisis. Besarnya proporsi suatu jenis belanja dapat menjadi indikator untuk mengukur komitmen dalam mendorong pertumbuhan sektor-sektor Pembangunan. Berikut adalah proporsi setiap jenis belanja terhadap total APBD Kabupaten Sambas tahun 2016–2021.

Tabel 3. Proporsi Jenis Belanja Terhadap Total Belanja APBD Kabupaten Sambas Tahun 2017-2022

NO.	JENIS BELANJA	2017	2018	2019
1	Belanja Operasi	65,45%	67,47%	65,00%
2	Belanja Modal	19,50%	16,85%	18,52%
3	Belanja Tak Terduga	0,002%	0,05%	0,02%
4	Belanja Transfer	15,05%	15,63%	16,46%
NO.	JENIS BELANJA	2020	2021	2022
1	Belanja Operasi	68,43%	69,02%	72,86%
2	Belanja Modal	14,05%	15,37%	12,37%
3	Belanja Tak Terduga	0,22%	0,01%	0,04%
4	Belanja Transfer	17,30%	15,60%	14,73%

Dari sisi belanja seperti tampak pada Tabel 3 proporsi setiap jenis belanja terhadap total belanja menunjukkan bahwa masih di dominasi oleh Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial) rata-rata sebesar 68,04%, kemudian Belanja Modal (Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi, Belanja Modal Aset tetap lainnya) rata-rata sebesar 16,11%, selanjutnya Belanja tak terduga rata-rata sebesar 0,05% dan Belanja Transfer (belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan)

rata-rata sebesar 15,80%. Desentralisasi fiskal seyogyanya dapat mendorong Pemerintah Daerah dalam menggali potensi daerah untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

METODE PENELITIAN

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kuantitatif yaitu metode penelitian yang menggunakan data-data berupa angka yang digunakan untuk mengupayakan suatu penelitian dengan cara menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dari laporan dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Teknik pengambilan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berupa data organisasi pemerintah desa, arsip kewenangan pemerintah desa dan data pengelolaan keuangan desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder baik yang bersumber dari Bakeuda Kabupaten Sambas berupa laporan keuangan pemerintah daerah dan melalui situs resmi BPS Kabupaten Sambas (<https://sambaskab.bps.go.id/>) berupa data Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan dokumen atau informasi yang telah tersedia yang bersumber dari buku, situs web atau data yang telah disediakan pihak ketiga yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Analisis data yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan yaitu: 1) Rasio Likuiditas, menunjukkan kemampuan Pemda untuk memenuhi kewajiban *financial* yang berjangka pendek tepat pada waktunya; 2) Rasio *Leverage*, menunjukkan seberapa jauh aktiva pemda dibiayai dengan hutang; 3) Rasio Hutang, menunjukkan kemampuan pemda dalam menjamin hutang; 4) Rasio Produktivitas, menunjukkan kapasitas pemda untuk melakukan produksi atau kegiatan sehari-hari; 5) Rasio operasi, menunjukkan kemampuan pemda dalam melaksanakan operasi atau pelayanan umum pemerintahan; 6) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) untuk melihat kemampuan pemda dalam menggunakan alternative sumber dana lain melalui pinjaman, nilai DSCR minimal 2,5. Rasio DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya, pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Adapun formula yang digunakan untuk mengukur rasio keuangan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Formula Rasio Keuangan

No	Rasio Keuangan	Formula
1.	RASIO LIKUIDITAS	
a.	<i>Current Ratio</i>	= $\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$
b.	<i>Cash Ratio</i>	= $\frac{\text{Kas} + \text{Ekuivalen Kas}}{\text{Hutang Lancar}}$
c.	<i>Cash to Current Liabilities</i>	= $\frac{\text{Kas} + \text{Ekuivalen Kas}}{\text{Hutang Lancar}}$
d.	<i>Acid Test (Quick) Ratio</i>	= $\frac{\text{Kas} + \text{Ekuivalen Kas} + \text{Piutang}}{\text{Hutang Lancar}}$
e.	<i>Cash Flow Ratio</i>	= $\frac{\text{Aliran Kas Operasi}}{\text{Hutang Lancar}}$

2.	RASIO LEVERAGE			Formula
	a.	<i>Short Term Debt to Long Term Debt Ratio</i>	=	Hutang Lancar Total Hutang
3.	RASIO HUTANG			
	a.	<i>Total Liabilities to Current Asset Ratio</i>	=	Total Hutang Aktiva Lancar
	b.	<i>Current Liabilities to Total Asset Ratio</i>	=	Hutang Lancar Total Aktiva
4.	RASIO PRODUKTIVITAS			
	a.	<i>Current Asset to Total Asset Ratio</i>	=	Aktiva Lancar Total Aktiva
	b.	<i>Quick Asset to Inventory Ratio</i>	=	Kas + Piutang Persediaan
5.	RASIO OPERASI			
	a.	<i>Earning Power of Total Investmen</i>	=	Surplus + Belanja Transfer Total Aktiva
	b.	Rasio Kemandirian Keuangan	=	Pendapatan Asli Daerah Bantuan + Pinjaman
	c.	Rasio Tingkat Partisipasi Publik	=	Pendapatan Pajak Total Pendapatan
	a.	<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	=	(PAD+Bagian Daerah+DAU) - Belanja Wajib Total(Pokok+Angsuran+Bunga+ Biaya Pinjaman)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Perhitungan Rasio Keuangan

Tabel 5. Rasio Keuangan (Data diolah, 2023)

NO.	RASIO KEUANGAN	2017	2018	2019	2020	2021
A	RASIO LIKUIDITAS					
1	<i>Current Ratio</i>	0,87	0,93	0,92	0,64	0,77
2	<i>Cash Ratio</i>	0,35	0,39	0,30	0,23	0,47
3	<i>Cash to Current Liabilities</i>	0,30	0,36	0,27	0,15	0,36
4	<i>Acid Test (Quick) Ratio</i>	0,61	0,69	0,69	0,43	0,58
5	<i>Cash Flow Ratio</i>	3,36	2,34	2,83	1,62	1,43
B	RASIO LEVERAGE					
1	<i>Short Term Debt to Long Term Debt Ratio</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C	RASIO HUTANG					
1	<i>Total Liabilities to Current Asset Ratio</i>	1,15	1,08	1,08	1,57	1,30
2	<i>Current Liabilities to Total Asset Ratio</i>	0,04	0,05	0,05	0,05	0,07

D RASIO PRODUKTIVITAS						
1	<i>Current Asset to Total Asset Ratio</i>	0,04	0,05	0,04	0,03	0,05
2	<i>Quick Asset to Inventory Ratio</i>	2,37	2,92	2,97	2,06	3,04
E RASIO OPERASI						
1	<i>Earning Power of Total Investmen</i>	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
2	Rasio Kemandirian Keuangan	0,15	0,09	0,11	0,10	0,10
3	Rasio Tingkat Partisipasi Publik	0,06	0,08	0,08	0,07	0,08
F DEBT SERVICE COVERAGE RATIO						
1	<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	4,11	2,88	2,81	2,35	1,79

B. Pembahasan

Secara umum indikator kinerja keuangan untuk rasio likuiditas dikatakan baik adalah apabila kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek semakin meningkat atau dengan kata lain semakin tinggi rasio ini akan semakin baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio likuiditas yang terdiri dari *current ratio* rata-rata sebesar 0,82 artinya setiap Rp.1,- Hutang lancar dijamin oleh Rp.0,82,- aktiva lancar; *Cash ratio* rata-rata sebesar 0,35 artinya setiap Rp.1,- aktiva lancar, sebesar Rp.0,35 merupakan kas dan setara kas; *cash to current liabilities* rata-rata sebesar 0,29 artinya kemampuan pemerintah daerah untuk membayar segera setiap Rp.1,- hutang lancar menggunakan kas dan setara kas sebesar Rp.0,29,-; *Quick Ratio* rata-rata sebesar 0,60 artinya bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya untuk setiap Rp.1,- menggunakan kas, setara kas dan piutang sebesar Rp.0,60,-; *cash flow ratio* rata-rata sebesar 2,31 artinya kemampuan aliran kas operasi suatu Pemerintah Daerah untuk membayar setiap Rp.1,- hutang lancar yang dimiliki menggunakan kas operasi sebesar Rp 2,31,-.

Rasio *Leverage* yang diukur adalah *Short Term Debt to Long Term Debt Ratio*. Rasio ini mengukur hubungan antara hutang jangka pendek atau hutang lancar dengan total hutang. Rasio ini merupakan indikasi penting seberapa besar pendanaan jangka pendek yang dibutuhkan. Semakin rendah nilai *Short Term Deb to Long Term Debt* suatu Pemerintah Daerah maka akan semakin baik yang berarti bahwa dari total hutang yang dimiliki sebagian besar bukan merupakan hutang yang harus dengan segera di bayar. Hasil perhitungan menunjukkan *Short Term Debt to Long Term Debt Ratio* sebesar 1,00, hal ini disebabkan pemerintah daerah tidak mempunyai hutang jangka panjang atau 100% adalah hutang yang harus segera di bayar atau seluruh hutang yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah Hutang Lancar.

Rasio hutang yang diukur adalah *Total Liabilities to Current Asset Ratio*. Rasio ini mengukur kemampuan aktiva lancar dalam menjamin hutang. Semakin rendah semakin baik. *Total Liabilities to Current Asset Ratio* rata-rata adalah sebesar 1,24 artinya untuk setiap Rp.1,- total hutang dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp.1,24,-. Selanjutnya adalah *Current Liabilities to Total Asset Rasio*, rasio ini mengukur kemampuan total Aktiva dalam menjamin hutang. Semakin rendah maka semakin baik. nilai *Current Liabilities to Total Asset Ratio* rata-rata adalah sebesar 0,05 artinya untuk setiap R.1,- hutang di jamin oleh total *asset* sebesar Rp.0,05,-

Rasio Produktivitas yang diukur adalah *Current Asset to Total Asset Ratio* dan *Quick Asset to Inventory Ratio*. *Current Asset to Total Asset Rasio*, rasio ini menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dimiliki, terdapat aktiva lancar yang digunakan secara langsung untuk

produksi atau operasional. Semakin tinggi maka akan semakin baik. Nilai *Current Asset to Total Asset Ratio* rata-rata adalah sebesar 0,04 artinya untuk setiap Rp.1,- aktiva lancar yang digunakan untuk kegiatan operasional adalah sebesar Rp.0,04,-

Quick Asset to Inventory Ratio, Rasio ini menunjukkan besarnya aktiva yang lebih likuid (dapat segera dicairkan) dibandingkan dengan persediaan. Semakin tinggi maka akan semakin baik. Nilai *Quick Asset to Inventory Ratio* rata-rata sebesar 2,67 artinya untuk setiap Rp.1,- aktiva lancar jika dibandingkan dengan persediaan bahwa jumlah aktiva sangat lancar atau yang segera bisa dicairkan adalah sebesar Rp.2,67., yang terdiri dari Kas dan Piutang.

Rasio Operasi yang diukur di antaranya adalah *Earning Power of Total Investment*. Rasio ini menunjukkan surplus sebelum belanja transfer dibanding dengan total aktiva. Semakin tinggi maka akan semakin baik. Nilai *Earning Power of Total Investment* rata-rata sebesar 0,10. Rasio Kemandirian keuangan rata-rata sebesar 0,11 atau sebesar 11%.

Pola hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah seperti tampak tabel dibawah ini :

Tabel 6. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2002: 169)

Dari aspek pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah masuk pada kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Kondisi ini menunjukkan peran pemerintah pusat masih sangat besar atau lebih dominan dari pada kemandirian daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Derajat Desentralisasi fiskal rata-rata sebesar 0,09 masuk pada kategori kemampuan keuangan daerah sangat kurang artinya bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah sangat kurang.

Rasio Tingkat Partisipasi Publik sebesar 0,07. Rasio ini menunjukkan tingkat partisipasi publik dalam pembayaran pajak dalam hal ini adalah semua pendapatan pajak daerah, bagi hasil pajak baik pusat maupun propinsi. Semakin tinggi nilai rasio tingkat partisipasi publik suatu Pemerintah Daerah maka akan semakin baik. Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa untuk setiap Rp.1,- Pendapatan, yang berasal dari pajak adalah sebesar Rp.0,07,-

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas rata-rata tahun 2017-2021 sebesar 2,79 atau masih berada di atas ketentuan minimal sebesar 2,5 sebagaimana diatur dalam PP 107/2000 tentang Pinjaman Daerah pasal 6 huruf b. Akan tetapi untuk tahun 2020 DSCR sebesar 2,35 dan tahun 2021 sebesar 1,79 berada di bawah ketentuan minimal sebagaimana di atur pada PP 107/2000. Kondisi ini disebabkan karena jumlah

pinjaman daerah dari tahun ke tahun relatif meningkat. Jadi pemerintah daerah untuk tahun mendatang harus menjaga agar DSCR masih berada pada batas minimum yang telah digariskan oleh pemerintah pusat karena apabila pinjaman terus meningkat akan dikhawatirkan pemerintah Daerah Kabupaten Sambas tidak mampu untuk memenuhi belanja wajib sebagaimana di atur PP 30/2011 tentang pinjaman daerah penjelasan pasal 15 ayat (1) huruf b.

PENUTUP

Dari hasil pembahasan seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Rasio likuiditas yang terdiri dari *current ratio* rata-rata sebesar 0,82, *Cash ratio* rata-rata sebesar 0,35 *cash to current liabilities* rata-rata sebesar 0,29; *Quick Ratio* rata-rata sebesar 0,60, *cash flow ratio* rata-rata sebesar 2,31 dan *Working Capital to Total Asset Ratio*, rasio ini menunjukkan besarnya modal kerja bersih terhadap total aktiva yang dimiliki oleh suatu Pemerintah Daerah. Semakin tinggi nilai rasio ini maka akan semakin baik. Rata-rata Modal kerja bersih pemerintah sebesar -0,009, artinya bahwa untuk setiap Rp.1,- modal kerja yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bersumber dari hutang adalah sebesar Rp.0,009,- atau Rp.0,01,-.

Rasio *Leverage* yang diukur adalah *Short Term Debt to Long Term Debt Ratio* sebesar 1,00 . Rasio hutang yang diukur adalah *Total Liabilities to Current Asset Ratio* rata-rata adalah sebesar 1,24 dan *Current Liabilities to Total Asset Ratio* rata-rata adalah sebesar 0,05 artinya untuk setiap R.1,- hutang di jamin oleh total *asset* sebesar Rp.0,05,-. Rasio Produktivitas yang diukur adalah *Current Asset to Total Asset Ratio* rata-rata adalah sebesar 0,04 artinya untuk setiap Rp.1,- aktiva lancar yang digunakan untuk kegiatan operasional adalah sebesar Rp.0,04,- *Quick Asset to Inventory Ratio*, rata-rata sebesar 2,67. Rasio Operasi yang diukur di antaranya adalah *Earning Power of Total Investment* rata-rata sebesar 0,10. Rasio Kemandirian keuangan rata-rata sebesar 0,11.

Rasio Tingkat Partisipasi Publik sebesar 0,07. Rasio ini menunjukkan tingkat partisipasi publik dalam pembayaran pajak dalam hal ini adalah semua pendapatan pajak daerah, bagi hasil pajak baik pusat maupun provinsi. Semakin tinggi nilai rasio tingkat partisipasi publik suatu Pemerintah Daerah maka akan semakin baik. Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa untuk setiap Rp.1,- Pendapatan, yang berasal dari pajak adalah sebesar Rp.0,07,- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas rata-rata tahun 2017-2021 sebesar 2,79 atau masih berada di atas ketentuan minimal sebesar 2,5 sebagaimana diatur dalam PP 107 (2000) tentang Pinjaman Daerah pasal 6 huruf b. Akan tetapi untuk tahun 2020 DSCR sebesar 2,35 dan tahun 2021 sebesar 1,79 berada di bawah ketentuan minimal sebagaimana di atur pada PP 107/2000. Kondisi ini disebabkan karena jumlah pinjaman daerah dari tahun ke tahun relatif meningkat. Jadi pemerintah daerah untuk tahun mendatang harus menjaga agar DSCR masih berada pada batas minimum yang telah digariskan oleh pemerintah pusat karena apabila pinjaman terus meningkat akan dikhawatirkan pemerintah Daerah Kabupaten Sambas tidak mampu untuk memenuhi belanja wajib sebagaimana di atur PP 30/2011 tentang pinjaman daerah penjelasan pasal 15 ayat (1) huruf b.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2001). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. BPFE.
- Budiarto, B. (2007). Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Halim, A. (2002). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.
- Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.
- Helfert, E. A. (1996). Teknik Analisa Keuangan: Petunjuk Praktis untuk Mengelola dan Mengukur Kinerja Perusahaan. Erlangga.
- Kabid Lattas. (2022, April 28). 26 Tahun Otonomi Daerah Di Indonesia. <https://Palangkaraya.Go.Id/26-Tahun-Otonomi-Daerah-Di-Indonesia/>.
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi.
- Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi.
- Munawir, S. (2002). Akuntansi Keuangan dan Manajemen. BPFE.
- Munawir, S. (2004). Analisis Laporan Keuangan. Liberty.
- Nataludin. (2001). Potensi Dana Perimbangan Pada Penerimaan Daerah Di Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah. UPP YKPN.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Penilaian Kinerja. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah. (n.d.).
- Ritonga, I. T. (2023). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pustaka Pelajar.
- Sartono, A. (2016). Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. BPFE.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards. Lukman Offset.
- Tangkilisan, H. N. S. (2007). Manajemen Publik. Grasindo.
- Ulum, I. (2004). Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik. UMM Press.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (n.d.).